

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan permasalahan serius yang dihadapi seluruh negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator gabungan/campuran tunggal yang tidak dapat mengukur semua elemen pembangunan manusia, namun mengukur tiga aspek utama dari pembangunan manusia, khususnya rentang umur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan serta akses ke aset yang diharapkan untuk mencapai kehidupan yang baik. Tingginya indeks pembangunan manusia dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusianya. Seperti yang telah dicantumkan dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka, sebagai negara yang sedang berkembang sasaran utamanya yaitu pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat kualitas hidup manusia salah satunya lewat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesejahteraan dan ekonomi. Melalui salah satu indikator tolak ukur tersebut, diharapkan bisa mengetahui perkembangan peningkatan kualitas hidup manusia.

Sumber daya modal sangatlah diperlukan untuk menggerakkan perekonomian dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Melalui pemberdayaan sumber daya manusia, kualitas dan kesejahteraan penduduk akan berhubungan dengan pengelolaan aset dalam arti terpenuhinya indikator Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia dapat menentukan keberhasilan pembangunan yang diharapkan juga bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dari dampak pembangunan tersebut.

Badan Pusat Statistik atau biasa disebut (BPS) selalu *update* menginformasikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik itu kabupaten/kota dan juga provinsi yang ada di Indonesia setiap tahunnya. Tujuannya tidak lain yaitu untuk mengetahui seberapa besar atau kecil keberhasilan pembangunan kualitas manusia dan juga dapat menjadi alat dan juga sarana untuk membandingkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap provinsi yang ada di Indonesia. Dengan begitu, dapat kita ketahui provinsi mana yang mempunyai IPM rendah dan provinsi mana yang mempunyai IPM tinggi. Berikut data yang di dapat dari Badan Pusat Statistika (BPS) 2021 dengan menggunakan metode terbaru yang terlampir sebagaiberikut :

Tabel 1.1
IPM Provinsi di Indonesia

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia 2021	Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia 2021
Aceh	72.18	Nusa Tenggara Barat	68.65
Sumatera Utara	72.00	Nusa Tenggara Timur	65.28
Sumatera Barat	72.65	Kalimantan Barat	67.90
Riau	72.94	Kalimantan Tengah	71.25
Jambi	71.63	Kalimantan Selatan	71.28
Sumatera Selatan	70.24	Kalimantan Timur	76.88
Bengkulu	71.64	Kalimantan Utara	71.19
Lampung	69.90	Sulawesi Utara	73.30
Kep. Bangka Belitung	71.69	Sulawesi Tengah	69.79
Kep. Riau	75.79	Sulawesi Selatan	72.24
Dki Jakarta	81.11	Sulawesi Tenggara	71.66
Jawa Barat	72.45	Gorontalo	69.00
Jawa Tengah	72.16	Sulawesi Barat	66.36
Di Yogyakarta	80.22	Maluku	69.71

Jawa Timur	72.14	Maluku Utara	68.76
Banten	72.72	Papua Barat	65.26
Bali	75.69	Papua	60.62
Indonesia	72.29		

Sumber : Badan Pusat Statistika, Indonesia 2021

Menurut Badan Pusat Statistik 2021, Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia meningkat rata-rata sebesar 0,69 persen (%). Peningkatan IPM di tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik dimensi pengetahuan, umur panjang dan hidup sehat, dan standar hidup layak. Hal ini tidak sama dengan ekspansi IPM pada tahun 2020 yang hanya ditopang oleh perluasan pada elemen rentang hidup dan kehidupan yang sehat dan komponen pengetahuan, sedangkan elemen harapan baik untuk kenyamanan sehari-hari telah berkurang. Pada tahun 2021, aspek kehidupan yang baik diperkirakan berdasarkan perubahan konsumsi per kapita asli tipikal akan meningkat sebesar 1,30 persen (%). Dalam aspek pendidikan, penduduk dewasa 7 tahun memiliki asumsi 13,08 pada harapan lama sekolah (bisa melalui sekolah konvensional), atau secara praktis sebanding dengan jangka waktu untuk menyelesaikan sekolah hingga tingkat Sertifikat 1. Angka ini merupakan peningkatan 0,10 tahun. Berbeda dengan tahun 2020 yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah bagi penghuni yang jatuh tempo 25 tahun ke atas bertambah 0,06 tahun, dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada 2021. Untuk komponen umur panjang dan sehat, anak-anak yang baru lahir ke dunia pada 2021 memiliki masa depan. hingga 71,57 tahun, 0,10 tahun lebih lama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) (BPS-Statistics Indonesia, 2021)

Secara spesial, provinsi dengan IPM tertinggi yaitu DKI Jakarta yang memperoleh IPM sebesar 81,11 (status tinggi) sedangkan IPM rendah adalah

Papua yaitu 60,62 (status sedang) dan terdapat 10 provinsi dengan perolehan IPM yang melebihi angka nasional dan Kalimantan Timur termasuk dalam kategori tersebut. Provinsi yang melebihi angka nasional yaitu DI Yogyakarta (80,22), Kalimantan Timur (76,88), Kepulauan Riau (75,79), Bali (75,69) Sulawesi Utara (73,30), Riau (72,94), Banten (72,72), Sulawesi Barat (72,65), dan Jawa Barat (72,45). Sedangkan dalam kategori rendah sudah tidak ada, karena semua sudah berada di atas 60,00.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) provinsi kalimantan timur tahun 2021 meningkat cukup signifikan dari sebelas tahun sebelumnya yaitu 71.31%, 72.02%, 72.62%, 73.21%, 73.82%, 74.17%, 74.59%, 75.12%, 75.83%, 76.61%, 76.24%, 76.88%. Faktor yang menjadi Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur meningkat yaitu disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada semua komponen penyusunan mulai dari faktor ekonomi khususnya pada angka harapan hidup penduduk kaltim saat lahir di tahun 2021 mencapai 74 tahun. Selanjutnya dari dunia pendidikan, harapan lama sekolah yang naik sebesar 1,39% pertahun, serta rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 1,28% pertahun, dan faktor yang menjadi pengaruh lainnya yaitu indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan penduduk kaltim 2021 sebesar Rp 12,12 juta per kapita pertahun. Hal tersebut yang menjadi faktor kemajuan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Timur dari tahun 2010 hingga 2021 dan berstatus tinggi.

Kini, kalimantan Timur digadang akan menjadi Ibu Kota Baru. Upaya pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Nusantara dimulai pada tahun 2019 pada masa kekuasaan Bapak Joko Widodo. Saat itu, melalui rapat terbatas yang digelar pemerintah pada 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memilih untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jawa. Wilayah ibu kota baru dideklarasikan pada 26 Agustus 2019, meliputi sebagian Pemerintahan Penajam Paser Utara dan Rezim Kutai Kartanegara di Wilayah Kalimantan Timur. Pertukaran ibu kota ke

nusantara tertuang dalam Rencana Perbaikan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintahan Jokowi.

Baru pada saat rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Telah disahkanlah Kalimantan Timur (Kaltim) oleh DPR dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui nama ibu kota baru yaitu Nusantara (kompas.com)

Kini, Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota. Di tahap awal, Istana Negara juga akan dipindah segera pada tahun 2024 mendatang bersama dengan 4 kementerian yakni kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan dan juga kementerian sekretaris negara.

Indikator-indikator kunci pembangunan yaitu : 1) indikator ekonomi yaitu PNB, PDB dan laju pertumbuhan ekonomi. 2) indikator sosial yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) (Kuncoro, 2006).

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diwujudkan dalam 3 komponen penting yaitu yang *Pertama*, akumulasi modal, yang mana disini meliputi segala bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal sumberdaya manusia. *Kedua*, pertumbuhan penduduk yang mana akan menambah jumlah angkatan kerja. *Ketiga*, kemajuan teknologi yang dalam pengertian sederhananya akan terjadi karena selalu *update* dalam menangani suatu pekerjaan (Todaro, 2004).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangatlah diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat penting bagi pemerintah daerah yang harus dikelola dengan baik guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah mempunyai ikatan yang sangat erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam memenuhi kehidupan masyarakat, belanja daerah dapat menjadi alokasi dana seperti anggaran untuk pendidikan yang dinyatakan dalam peraturan no. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional bahwa 20% dari rencana keuangan daerah dibagikan untuk biaya fungsional pelatihan sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang berharga untuk mendapatkan pelatihan yang sah dengan dinas yang diberikan oleh pemerintah lingkungan untuk mengurangi tingkat pendidikan/ kecakapan secara lokal. Ini secara tegas dapat mempengaruhi catatan kemajuan manusia di daerah tersebut. Sehingga dapat memenuhi sebuah penanda yang telah ditetapkan oleh PBB untuk mengevaluasi indeks pembangunan manusia di suatu negara, khususnya, tingkat angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan daya beli.

Penghambat pembangunan nasional suatu negara salah satunya yaitu faktor kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang meningkat di suatu negara dapat mengindikasikan belum dilaksanakannya secara maksimal usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kemiskinan adalah masalah sosial yang berdampak di kehidupan masyarakat (Nunung, 2008).

Tingkat kemiskinan disuatu negara mempunyai ikatan erat dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Apabila jumlah individu miskin dalam suatu bangsa meningkat, maka akan mempengaruhi penguatan kerja pada sifat SDM dan memiliki saran untuk daftar perbaikan manusia. Masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat rumit, karena mencakup berbagai bidang seperti keuangan, sosial, budaya dan sudut pandang yang berbeda. Badan Pusat Statistik (BPS)

menyebut jumlah penduduk miskin di Kaltim terus berkurang, tepatnya dari 2021 sebanyak 241,77 ribu (6,54%). Pada tahun 2020 sebanyak 243,99 ribu (6,64%), bisa diartikan bahwa jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang 2,22 ribu atau (0,10%) (BPS, 2021).

Jika melihat uraian diatas maka, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA DAERAH, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”** karena begitu pentingnya dilakuka upaya peningkatan kualitas di bidang manusia sehingga menarik untuk diteliti pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, belanja daerah dan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat di temukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2021?
2. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur 2010-2021?
3. Apakah Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur 2010-2021?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sesuai dengan tujuan yang disampaikan. Hal itu dilakukan agar penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Penelitian berfokus pada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur 2010-2021?
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur 2010-2021?
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur 2010-2021?

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” JawaTimur.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.